

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Saya memilih judul “Presiden Berlatarbelakang Militer dan Pengaruhnya terhadap Proses Demokrasi di Indonesia (Sebuah Analisa Studi Komparatif antara Indonesia Ordebaru dan Turki Kemalis)” sebagai judul skripsi berdasarkan berapa alasan:

Pertama, pada dasarnya adanya ketertarikan saya terhadap permasalahan yang timbul di negara-negara berkembang khususnya Indonesia, terutama pada permasalahan politik dan proses demokrasi di negara tersebut.

Kedua, Orde Baru merupakan masa dimana masyarakat Indonesia mengalami proses pembaruan yang ditandai dengan kepemimpinan Soeharto menggantikan Soekarno, diawali dengan adanya pemberontakan G 30 S/PKI, dan berbagai krisis nasional terjadi untuk memecah belah Indonesia, sehingga untuk mengatasi hal tersebut Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1968 yang kemudian dikenal dengan Supersemar, yang kemudian dianggap sebagai titik awal Orde Baru, secara politik dimanfaatkan Letjen Soeharto sebagai pemegang Supersemar untuk membubarkan PKI. Yang pada akhirnya pergantian kekuasaan, pada tanggal 27 Maret 1968 Jenderal Soeharto melalui Ketetapan MPRS No. XLIV/ MPRS/ 1968. MPRS memilih Jenderal Soeharto

berperan dalam bidang politik sehingga tidak dapat dielakkan bahwa pemerintahan tersebut mulai bersikap otoriter.

Ketiga, rezim militer yang telah dijalankan Soeharto selama kurang lebih 32 tahun telah menghambat proses demokrasi yang berjalan di Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi merupakan salah satu contoh kegagalan proses demokrasi di Indonesia.

Keempat, dinamika proses demokrasi yang terjadi di Indonesia pada masa rezim militer Soeharto dapat dibandingkan dengan proses demokrasi pada masa rezim militer di Turki dibawah pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk, dimana militer memegang banyak kekuasaan melebihi para elit politik yang terpilih dikarenakan Angkatan Bersenjata Turki menduduki posisi istimewa dinegara tersebut. Sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan proses demokrasi pada rezim militer.

## **B. TUJUAN PENULISAN**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan eksplanasi kritis terhadap proses demokrasi dibawah rezim militer yang sudah terjadi sekaligus analisa proses demokrasi jika resim militer menguasai kembali, dengan berusaha menyajikan obyektifitas dalam penulisan ilmiah.
2. Menjelaskan perjalanan proses demokrasi di Indonesia dibawah rezim

3. Sebagai sarana implementasi teori-teori yang penulis peroleh selama masa kuliah terhadap proses demokrasi dibawah rezim militer.
4. Untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Strata-1 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### C. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Demokrasi sebagai dasar hidup negara pada umumnya memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah negara oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.

Sejak kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, persoalan hubungan sipil militer menjadi perbincangan serius dalam perpolitikan Indonesia. Di kalangan aktifis LSM, media massa dan para intelektual termasuk masyarakat yang menyadari akan bahayanya militerisasi dalam demokrasi jika seorang pemimpin negaranya mempunyai latar belakang militer dan pengaruhnya terhadap stabilitas bangsa. Mengingat militer selama pemerintahan Orde Baru

dampak rusaknya proses demokrasi. Beberapa kalangan sipil berpendapat bahwa “Negara tidak dapat maju jika konsep Dwi Fungsi ABRI tidak disingkirkan seperti yang diungkapkan oleh Sri Bintang Pamungkas mantan anggota DPR, yang juga menyatakan bahwa ABRI adalah penghambat demokrasi dan karena itu dominasinya didalam system politik harus dihentikan”<sup>1</sup>. Sebuah pendapat dari Harold Crouch serupa dengan pernyataan dari Sri Bintang Pamungkas bahwa dalam konteks Indonesia, kehancuran sistem demokrasi terpimpin yang terjadi setelah bencana yang menyertai percobaan kudeta pada tahun 1965 telah menempatkan AD sebagai kekuatan politik yang dominan. Anggapan-anggapan tersebut muncul mengingat militer selama pemerintahan Orde Baru telah melampaui perannya dibawah rekayasa Dwi Fungsi ABRI, dengan dampak rusaknya proses demokrasi. Beberapa praktek bisnis militer, sejumlah kasus HAM di Timor-Timur, Papua, Tanjung Priok telah memberikan gambaran sejarah adanya penyalahgunaan peran ABRI dan hambatan proses demokrasi. Dan kenyataannya militerisme sipil masih bekerja efektif ditengah masyarakat, diperkuat oleh bekerjanya kultur kekerasan dalam tradisi sosial dalam pendidikan. Dan Orde Baru digambarkan sebagai periode yang memunculkan kekhawatiran menguatnya otoriterisme. Walaupun, sebelum pemerintahan jatuh ketangan Soeharto, yaitu pada masa pemerintahan Soekarno, politik juga lebih bersifat otoriter terutama pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi mempersyaratkan adanya kemungkinan rotasi kekuasaan, kebebasan berpendapat, dan dijunjung tingginya Hak Asasi

---

Manusia, tetapi hal tersebut tidak terjadi di Indonesia pada masa pemerintahan orde baru. Pada masa Orde Baru, militer menganggap bahwa partai-partai politik, demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin dimasa Soekarno justru menyebabkan instabilitas politik, sehingga memunculkan tuntutan pembaharuan struktur politik yang semula terdiri dari banyak partai yang hanya menjadi pelindung bagi kepentingan rakyat semata. Bentuk intimidasi, teror, dan tekanan terhadap masa bahwa dalam pelaksanaan pemilihan untuk memberikan suaranya pada salah satu partai besar telah memberikan gambaran terhadap proses demokrasi pada masa pemerintahan Soeharto.

Dengan runtuhnya demokrasi parlementer<sup>2</sup> yang kemudian oleh Soekarno digantikan dengan system demokrasi terpimpin<sup>3</sup>, maka peran TNI dalam kehidupan sosial politik yang terbesar adalah semasa Orde Baru dibawah pemerintahan Soeharto dengan konsep Dwi Fungsi ABRI yang dihasilkan melalui seminar Angkatan Darat II tahun 1996 yang merupakan bentuk legitimasi kekuasaan politik militer yang sangat luas<sup>4</sup>. Angkatan Darat sebenarnya telah mendominasi pemerintahan sejak 1996, dan tampilan kerja sama sipil militer didalam pemerintahan yang berjalan pada masa itu banyak diikutsertakan pula orang-orang sipil dengan tujuan mendapatkan keahlian dan pengalaman mereka agar dilihat benar dan menciptakan gambaran yang baik

---

<sup>2</sup> Demokrasi parlementer merupakan system demokrasi dimana kabinet bertanggung jawab pada parlemen yang artinya kabinet bisa dibubarkan dengan mosi tidak percaya parlemen (Diktat Mata Kuliah Demokrasi, Bambang Cipto, 1998)

<sup>3</sup> Didalam Demokrasi Terpimpin, pemerintahan didasarkan atas kekuasaan atau dianut faham negara hukum yang meletakkan hukum dalam posisi tertinggi atau supremacy of law, persamaan dimuka hukum atau equality before the law adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia atau the protection of human right.

<sup>4</sup> Arif Yulianto, Hubungan Sipil-Militer di Indonesia Pasca Orba di Tengah Pusaran Demokrasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.

kepada luar negeri untuk mendapatkan bantuan. Keberadaan Dwi Fungsi ABRI selama 32 tahun, kekuasaan Orde Baru lebih banyak ditampilkan sisi-sisi positifnya sehingga dapat memperkuat keberadaannya. Dominasi militer yang terjadi pada masa itu tidak memberikan peluang pada sipil untuk ikut berpartisipasi dalam bidang politik terutama didalam proses pembuatan kebijakan politik kenegaraan. Dan fungsi-fungsi partai politik kurang berjalan sebagai mana mestinya yang dianggap tidak lebih dari sebuah rekayasa demokrasi, dan hanya berjalan dari sebuah kendali. Kehendak dan aspirasi rakyat tidak tersalurkan sebagai mana mestinya, legislatif yang lebih banyak mempunyai kepentingan untuk partainya saja. Perbedaan yang sangat mencolok antara pemimpin Angkatan Darat dan partai-partai pada masa itu adalah kesetiaan pemimpin Angkatan Darat terhadap modernisasi dan pembangunan sedangkan bagi partai-partai pada kepentingan segolongan masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan-tujuan nasional. Kompromi pemerintah terhadap partai-partai ditanggapi dengan sebuah rencana Dwiparti di Jawa Barat pada tahun 1967 yang dipertimbangkan pembubaran partai-partai yang ada dengan dua partai baru yang dianggap sebagai pemerhati dan berkonsentrasi pada modernisasi dan pembangunan. Rencana tersebut didukung oleh Panglima Siliwangi Dharsono dan rekannya Panglima Kostrad Kemal Idris. Namun rencana dari kedua Panglima tersebut belum diperbolehkan oleh pemerintah untuk diambil tindakan terhadap partai-partai yang ada. Sehingga diubahlah rencana yang ada dengan rencana baru

partai-partai yang ada tanpa harus dilakukan pembubaran, dan ternyata sistem tersebut sangat bertentangan dengan strategi pemerintah sehingga sistem tersebut diberhentikan. Keberadaan partai politik pada masa itu menjadi perdebatan dikalangan pemerintahan dalam usaha pembentukan sistem politik tanpa partai-partai lama.

Dominasi militer terhadap kehidupan politik pada akhirnya dibenarkan karena adanya janji pemerintah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, hal tersebut sangat berbeda dengan pemerintahan sebelumnya dibawah kepemimpinan Soekarno yang berjanji akan mempertahankan Revolusi 1945 dan perjuangan melawan imperialisme, sedangkan Soeharto menawarkan stabilisasi dan pembangunan.

Mengenai proses demokrasi di Indonesia dibawah kekuasaan Soeharto seorang presiden yang berlatar belakang militer, dapat diperbandingkan dengan proses demokrasi Mustafa Kemal Attaturk seorang pemimpin pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk, walaupun dia seorang yang mempunyai latar belakang militer, dia pendiri negara sekuler modern telah memisahkan militer dari politik militer bukan saja berjasa dalam perang kemerdekaan, namun mereka juga berjasa meletakkan landasan yang kokoh bagi Turki. Angkatan bersenjata tetap beranggapan bahwa mereka sebagai penjaga tujuan-tujuan demokrasi, reformasi dan sekularisasi yang diproklamirkan oleh Attaturk. Militer Turki juga memperlihatkan perannya sebagai pelindung masyarakat dari segala macam ancaman. Dari beberapa

presiden berlatar belakang militer, dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh seseorang yang berlatar belakang militer akan menerapkan sistem-sistem kemiliteran dalam menjalankan kekuasaannya sehingga pada Pemilu 2004 yang lalu dengan munculnya calon presiden yang berlatar belakang militer menimbulkan isu sipil militer dan kekhawatiran akan terhambatnya proses demokrasi<sup>5</sup>.

#### **D. POKOK PERMASALAHAN**

Dari latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut. Mengapa pengaruh presiden berlatar belakang militer di Indonesia pada masa Orde Baru dianggap sebagai penghalang proses demokrasi, sedangkan di Turki Kemalidis tidak demikian?

#### **E. KERANGKA DASAR PEMIKIRAN**

##### **a. Konsep Demokrasi**

Dalam pelaksanaan pemerintahan, kehidupan yang demokratis dijadikan sebuah tujuan nasional. Demokrasi diambil dari bahasa Yunani yaitu Demos dan Kratos. Demos berarti rakyat dan Kratos berarti pemerintahan. Dalam pemerintahan yang demokratis, rakyat sepenuhnya harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut hidup mereka disegala tingkatan secara bebas, adil, dan jujur. Jadi, dalam demokrasi, kepentingan rakyat yang utama. Demokrasi bukan

---



merupakan ideologi yang digunakan untuk kepentingan sekelompok kecil masyarakat atau partai saja tetapi seluruh lapisan masyarakat yang diatur secara tertib oleh pemerintah.

James Bryce merumuskan demokrasi sebagai sebuah etos, gaya hidup masyarakat, sebuah etos egalitarian yang berdasar pada kesamaan nilai. Dan menurut Robert A Dahl demokrasi itu adalah suatu sistem politik dimana para anggotanya saling memandang satu dengan yang lainnya sebagai orang-orang yang sama dipandang dari segi politik, dan secara bersama-sama adalah berdaulat, dan memiliki segala kemampuan, sumberdaya, dan lembaga-lembaga yang mereka perlukan demi untuk memerintah diri mereka sendiri<sup>6</sup>.

Masyarakat dapat dikatakan sudah berdemokrasi jika terdapat prinsip-prinsip utama atau pilar demokrasi sebagai berikut<sup>7</sup>:

1. Hak tau, bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi tentang keputusan pemerintah yang menyangkut hidup mereka.
2. Peran pers yang bebas, negara tidak membatasi peran media masa dalam menginformasikan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat.
3. Ada oposisi, adanya kelompok yang melakukan kontrol terhadap kerja pemerintah.
4. Pembuatan UU yang terbuka, rakyat bisa mengomentari RUU sebelum disahkan.

---

<sup>6</sup> Robert A. Dahl, *Demokrasi dan para pengkritiknya*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992, hal. XXXVIII.

5. Pengadilan yang independen, peradilan harus benar-benar bebas dari campur tangan siapapun.
6. Ada pembatasan kekuasaan presiden.
7. Hak minoritas/kaum marginal terjamin, negara harus mampu memberikan perlindungan hukum terhadap kelompok-kelompok kecil yang tersingkir.
8. Pemerintah tunduk pada konstitusi.
9. Pemilu yang bebas dan adil.
10. Pembagian kekuasaan yang seimbang antara lembaga pemerintah, DPR/MPR dan lembaga peradilan.
11. Kontrol sipil atas militer, militer hanya bertugas menjaga sistem demokrasi bukan menguasai.

Indonesia dalam perkembangan demokrasi terutama pada masa pemerintahan Soeharto belum bisa dikatakan solid. Hal ini dapat dilihat dari beberapa poin dalam 11 Pilar Demokrasi yang menunjukkan kekurangan pemerintahan Soeharto dalam menciptakan negara yang demokratis. Kekerasan masih sering terjadi akibat ulah dari militer. Rakyat tidak mempunyai kebebasan dalam berpendapat, dan pers tidak diberikan kebebasan dalam menjalankan perannya memberikan informasi bagi masyarakat, apabila terjadi perbedaan pendapat dengan kebijakan yang ada rakyat / dibungkam dengan berbagai ancaman. Kaum-kaum marginal

tradisi dan eksistensi tidak diakui. Banyak terjadinya kerusuhan yang melibatkan militer dalam pelanggaran HAM dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh militer sebagai contohnya adalah kasus Tanjung Priok dan 27 Juli 1996, bahkan diberlakukannya Daerah Operasi Militer di beberapa wilayah yang justru banyak memakan korban warga sipil yang tidak bersalah yang disebabkan adanya pemberontak atas kebijakan pemerintahan Soeharto yang sentralistik. Dari beberapa peristiwa yang tersebut diatas dengan acuan prinsip-prinsip 11 Pilar Demokrasi, telah menunjukkan bahwa demokratisasi pada masa Orde baru belum dapat terwujud.

b. Teori Peran Militer dan Politik

Dalam telaah mengenai intervensi militer dalam bidang politik di beberapa negara, Samuel P. Huntington berasumsi bahwa: Intervensi militer dalam politik disebabkan oleh "*the absence of effective political institutions capable of mediating, refining, and moderating group political actions*" (tidak adanya kemampuan institusi/lembaga politik yang efektif dalam menengahi/menghubungkan, memperbaiki/menyaring, dan melunakkan aksi-aksi kelompok politik). Asumsi tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam sebuah sistem politik selalu terjadi berbagai macam tuntutan dari berbagai kekuatan politik dan tidak semuanya dapat dipenuhi karena

1. Menghubungkan tindakan-tindakan berbagai kekuatan politik yang ada.
2. Menyaring berbagai tuntunan yang masuk (memisahkan antara tuntunan yang perlu diangkat menjadi isu politik atau yang dikesampingkan).
3. Melunakkan tuntunan yang ekstrim.

Menurut Samuel P. Huntington, dalam sistem politik, fungsi ini mestinya dijalankan oleh partai politik yang kuat. Militer dapat melakukan intervensi politik karena ketiadaan partai politik yang efektif. Huntington menganggap intervensi militer dan politik, pada hakekatnya menyalahi etika militer sebagai militer profesionalnya dan merupakan sebuah tanda adanya political decay (pembusukan politik). dalam menjelaskan argumen tersebut, Huntington membagi militer menjadi dua model, yaitu:

1. Militer profesional yang menjunjung tinggi semangat korporasi, profesionalisme keterampilan dalam menguasai senjata, ideologi nasionalisme.
2. Militer pretorian, yaitu militer yang aktif dalam politik. Dalam militer pretorian ada yang pada dasarnya berorientasi sipil dan akhirnya ingin kembali ketugas sipil yang oleh Huntington disebut sebagai *arbitrator army*. Dan ada juga yang menganggap tentara sebagai satu-satunya alternatif untuk mencegah kekacauan dan hanya dirinyalah yang

Huntington menyebutnya sebagai *ruler army*.

Masing-masing tipe militer memiliki orientasi yang berbeda-beda. Jenis-jenis orientasi militer menurut Samuel P. Huntington adalah<sup>8</sup>:

1. Prajurit profesional

Menurut Huntington, tentara modern dibedakan dari tentara sebelum tahun 1789 oleh statusnya sebagai suatu kelompok korporasi profesional. Perwira profesional di zaman modern merupakan satu kelas social yang baru dan mempunyai ciri-ciri dasar sebagai berikut:

- a. Keahlian (dalam manajemen kekerasan)
- b. Pertautan (tanggung jawab kepada klien, masyarakat atau negara)
- c. Korporatisme (kesadaran kelompok dan organisasi birokrasi)
- d. Ideology (semangat militer)

2. Prajurit Pretorian

Militer pretorian sering timbul di masyarakat-masyarakat yang bersifat agraris, atau transasi, atau secara ideologis terpecah-pecah. Dan pada dasarnya pretorianisme militer timbul bersamaan dengan sistem-sistem pengendalian politik subyektif dari model Huntington yakni, segera setelah kegagalan revolusi social, politik atau modernisasi<sup>9</sup>. Dalam teori hubungan sipil-militer, Huntington mengatakan bahwa pengendalian sipil terhadap militer menurut kenyataan ada dua cara, yaitu:

---

<sup>8</sup> Amos Perlmutter, *Militer dan Politik*, Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 14.

<sup>9</sup> Amos Perlmutter, *Op. cit.*, hal. 18.

1. Pengendalian sipil obyektif (*objective civilian control*), yaitu pengendalian yang dipandang Huntington sebagai pengendalian sipil terhadap militer secara sehat karena profesionalisme militer diperbesar porsinya.
2. Pengendalian sipil subyektif (*subjective civil control*), yaitu pengendalian yang membawa hubungan sipil-militer tidak sehat atau memburuk karena pengendalian ini dilakukan dengan memperbesar kekuatan sipil dibandingkan dengan kekuatan militer. Menurut Amos Perlmutter, tipe kedua ini akan menjadikan tentara professional menjadi tentara pretorian.

Negara pretorian modern adalah suatu negara dimana berkembangnya kecenderungan campur tangan militer dalam pemerintahan dan mempunyai potensi untuk mendominasi badan eksekutif. Cirinya yang penting adalah adanya badan eksekutif yang tidak efektif dan pembusukan politik. Kepemimpinan politik dalam negara pretorian modern berasal dari tentara atau kelompok-kelompok yang bersimpati kepada tentara. Perubahan-perubahan konstitusi dicapai dan dipelihara oleh tentara dan tentaralah yang memainkan peranan dalam lembaga-lembaga politik<sup>10</sup>.

Pendapat Huntington mengenai intervensi militer dalam berpolitik

.. .. " .. .. 10. ... ..

pemerintahan Soekarno yang dianggap belum bisa mengambil langkah konkrit dalam menindaklanjuti keberadaan partai komunis di Indonesia yang pada masa itu telah merugikan bangsa Indonesia sehingga terjadi tragedi G30S/PKI. Bahkan Soekarno memunculkan Nasakom (Nasional, Agama, Komunis) sehingga PKI merajalela, dan ABRI menolak Nasakom karena ABRI berpegang teguh pada UUD 1945 dan merajalelanya PKI sehingga ABRI mulai mengambil tindakan dengan mengambil peran politik PKI yang dirasakan semakin mengancam eksistensinya dan memperburuk kondisi sosial politik Indonesia.

Begitu pula yang telah terjadi di Turki dimana pemerintahan Turki pada masa Sultan Abdul Hamid II bersifat sentralistik secara absolut, sehingga banyak wilayah yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Turki membuat kedudukan Sultan semakin terguncang. Dan dalam kondisi negara yang kacau, pemerintahan Hamid jatuh ketangan orang-orang Komite Persatuan dan Kemajuan seperti Enver Pasya, Jalad, dan Jemal yang memunculkan pemerintahan dengan corak kediktatoran militer dengan menyusun angkatan perang dengan didatangkan ahli-ahli perang dari Jerman, sementara kritik Mustafa Kemal Pasya seorang yang juga mempunyai latar belakang militer yang menganggap bahwa tindakan yang diambil tersebut justru akan merugikan bagi Turki itu tidak dihiraukan, bahkan Mustafa Kemal Pasya diasingkan ke Sofia sebagai atase militer. Lewat kecakapannya dan strateginya dalam menghadapi front Rusia di

pertahanan. Militer tidak saja berjasa dalam perang kemerdekaan. Walaupun Mustafa Kemal Pasya seorang yang mempunyai latar belakang militer, dia pendiri negara sekuler modern telah memisahkan militer dari politik. Dengan adanya ide tersebut banyak orang-orang Islam Turki yang dirugikan karena hampir semua sistem yang berlaku didalam pemerintahan adalah hasil adopsi dari barat.

## **F. HIPOTESA**

Dari kerangka dasar pemikiran yang telah disusun diatas, penulis mendapatkan jawaban sementara atas pernyataan yang muncul, karena orientasi militer Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru Soeharto. mempunyai orientasi militer pretorian yang cenderung akan menghambat proses demokrasi, sedangkan di Turki pada masa pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk tidaklah pretorian melainkan militer professional yang menjunjung tinggi semangat korporasi, professionalisme keterampilan dalam menguasai senjata, dan berideologi nasionalisme.

## **G. JANGKAUAN PENELITIAN**

Demi tujuan penulisan, jangkauan penelitian yang diambil dalam penulisan ini mencakup perkembangan pemerintahan Indonesia dibawah rezim militer Soeharto dan pemerintahan Turki di bawah kekuasaan Mustafa Kemal Attaturk sebagai studi komparasinya. Walaupun demikian penulis



masa sebelumnya untuk mendukung penjelasan atas pembahasan yang diperlukan.

## **H. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Penelitian ini merupakan penelitian literature, sehingga data-data yang ada dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder seperti buku-buku, jurnal dan sumber-sumber lain yang terkait dan mendukung penelitian ini yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan analisis atas permasalahan yang muncul.

## **I. SISTEMATIKA PENULISAN.**

Penulisan skripsi ini tersusun atas lima bab, yang sistematikanya sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan yang memuat tentang alasan pemilihan judul, latar belakang, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, dan hipotesa.

BAB II, membahas tentang kondisi pemerintahan sebelum militer berkuasa, dan dasar tuntunan demokrasi di Indonesia dan Turki. Di Indonesia dibawah pemerintahan Soekarno, dan di Turki dibawah pemerintahan Sultan Hamid II yang membahas mengenai kondisi sosio politik dan proses demokrasi dikedua negara.

BAB III, membahas tentang peran militer dan dinamika pemerintahan

... ..

politik, dan bidang ekonomi untuk menunjukkan bahwa dibawah kekuasaan Soeharto, proses demokrasi di Indonesia terhambat karena adanya dominasi militer dalam politik pemerintahan.

BAB IV, membahas tentang peran militer dan dinamika pemerintahan Turki dibawah kekuasaan Mustafa Kemal Attaturk dilihat dari bidang sosial politik, dan bidang ekonomi untuk menunjukkan bahwa dibawah kekuasaan Mustafa Kemal Attaturk proses demokrasi Turki terhambat bukan karena dominasi militeris melainkan sebuah pemerintahan yang otoriter dengan sistem satu partainya.